

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

Baubaupost.com

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Senin
04 Maret 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Pemkot Baubau Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari akan melakukan lelang atau penjualan di muka umum barang milik daerah 12 paket Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua pada Selasa (5/3/2023) bertempat di kantor BP-KAD Kota Baubau Jalan Raya Palagimata.

Demikian diungkapkan Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si dalam press release-nya Rabu (28/2/2024).

Menurut Saido Bonsai, penawaran lelang 12 paket kendaraan roda empat dan dua tersebut akan dilakukan melalui aplikasi lelang Indonesia secara terbuka (open



Sekda Baubau Saido Bonsai

bidding) pada alamat domain <http://www.lelang.go.id> dan/atau portal.lelang.go.id.

Dikatakan, untuk mengikuti lelang, peserta lelang harus memenuhi persyaratan diantaranya

memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website portal.lelang.go.id.

Lanjutkan ke Hal: 7

Diskominfo Akan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di Baubau



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP---Pengelolaan jaringan telekomunikasi di Kota Baubau akan dievalu-

asi keberadaannya oleh Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal itu berkaitan dengan

masa pengelolaan, batas usia, hingga sebaran jaringan telekomunikasi dimaksud, termasuk ke-

Lanjutkan ke Hal: 7



Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pemprov Sultra Gelar Gerakan Pangan Murah



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP--Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meng-

gelar Gerakan Pangan Murah (GPM) selama 3 (tiga) hari dimulai hari Selasa (27/02/24) sampai dengan hari Kamis (29/02/24), bertempat di

Pelataran Masjid Raya Al-Kautsar Kota Kendari.

Kegiatan ini diseleng-

Lanjutkan ke Hal: 7

Elite Golkar Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Laporan: Andina L

JAKARTA-Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mendukung Presiden kedua RI Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Mekeng menyu-

Lanjutkan ke Hal: 7



Presden RI ke 2
Soeharto

Sekda Buton Lantik Pj. Kades Wakalambe dan PAW BPD Boneatiro



Peliput: Rahman

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin,

SPd, MSi melantik dan mengambil sumpah jabatan Penjabat Kepala Desa Wakalambe Ke-

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Pemkot Baubau Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua

lang.go.id, memilih obyek lelang yang akan diikuti pada website portal.lelang.go.id, menyertor uang jaminan melalui virtual account (VA) yang diperoleh melalui website portal.lelang.go.id.

Setelah memilih dan mengikuti obyek lelang, nom-

inal uang jaminan lelang yang disetorkan ke rekening VA harus sama dengan uang jaminan lelang yang disyaratkan dan uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Untuk lebih

jelasan terkait persyaratan dapat ditanyakan langsung ke BPKAD Kota Baubau atau menghubungi cp sdr Muh Gazali (HP 082271174969) dan sdr Gamal (HP 085299000170), katanya.

Sementara itu, 12 paket kendaraan roda empat

dan dua yang akan dilelang tersebut diantaranya merk Toyota, Daihatsu dan Nissan Terra-no Spirit, Kendaraan Dump Truck merk Toyota, Kendaraan Roda dua Merk Kymco, Yamaha, Honda, Suzuki. (*)

Sekda Buton Lantik Pj. Kades Wakalambe dan PAW BPD Boneatiro



Diskominfo Akan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di Baubau

beradaan vendor sebagai pihak pengelola.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si Kamis siang ini (29/2), dalam rapat internal pengelolaan telekomunikasi.

“Pengelolaan dan urusan jaringan telekomunikasi adalah kewenangan pemerintah pusat, tetapi hal teknis berkaitan administratif, dan kondisi sosial kemasyarakatan dengan kehadiran jaringan telekomunikasi, harus terdata dan terpantau di Kominfo,” kata Andi Hamzah.

Disebutkan Andi Hamzah, data jaring-

gan sama sekali tidak tercatat di Kominfo, demikian halnya keberadaan dan kondisi tower BTS-BTS (Base Transceiver Station) juga belum terevaluasi kondisinya. “Ini berkaitan dengan keselamatan warga, masa kelayakan, hingga pencatatan administrasi, semua harus terdata dengan baik, apalagi saat ini musim penghujan, hal-hal force major bisa saja terjadi,” pungkasnya.

Karena itu ia berharap, selain inisiatif internal Diskominfo, para vendor dan penyedia jasa telekomunikasi, tidak hanya melaporkan keadaannya pada unit kerja berkaitan perizinan, pajak dan

analisis kelayakannya, tetapi juga berhubungan langsung dengan Diskominfo, untuk hal yang bersifat administratif, monitoring dan pengawasan.

“Tugas kami berkaitan dengan monitoring dan pengawasan apa lagi berkaitan keselamatan warga, data-data tentunya harus terintegrasi ke Kominfo, jangan nanti ada masalah baru ke Kominfo. Jadi dalam waktu dekat kami akan melakukan monitoring dan pengawasan. Vendor-vendor juga bisa melaporkan langsung keberadaannya di Diskominfo, agar terbangun kerjasama yang baik.” ujarnya. (*)

Sementara berkaitan dengan prasarana jaringan telekomunikasi yang belum dapat disentuh melalui anggaran pemerintah pusat, Diskominfo Baubau masih melakukan pemetaan untuk dapat diusulkan penganggarnya melalui APBD Kota Baubau. seperti; pengelolaan jaringan komunikasi di ruang-ruang publik; pelayanan sarana prasarana per Kantor pemerintah; jalur transportasi dan pemukiman penduduk.

“Tentu pengerjaannya secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi sumberdaya anggaran,” imbuh Andi Hamzah. (*)

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pemprov Sultra Gelar Gerakan Pangan Murah

garakan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Bulan Suci Ramadan 1445 H / 2024 M sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta pengendalian inflasi di Provinsi Sultra.

Adapun komoditas bahan pangan yang diperjualbelikan pada GPM ini masing-masing beras SPHP total 6 ton, beras premium 3 ton, telur ayam ras 600kg, minyak goreng 1800 liter, gula pasir 1 ton, bawang merah 300 kg, bawang putih 300 kg, dan cabai dengan total 100 kg. “Berangkat dari

hasil monitoring Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di lapangan ditemukan adanya kenaikan harga beras di rentang harga Rp.14.950. Kami lalu menggelar GPM ini yang tentu harga jualnya di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

Ia menambahkan, “naiknya harga beras akan berimplikasi pada stabilitas angka inflasi. Saat ini inflasi Sultra sebesar 2.46% di bawah rerata nasional 2.57%. Oleh sebab itu, GPM ini dirasa penting untuk diselenggarakan,” tambahnya.

Pj Gubernur mengatakan akan intens

koordinasi dengan Perum Bulog Sultra untuk segera menyalurkan stok beras ke pasar. Ini merupakan langkah konkret untuk menekan harga beras di pasar.

“Saya juga intens komunikasi dengan Kepala Perum Bulog, Bu Siti Mardati untuk penyaluran stok beras ke pasar-pasar kita. Dari hasil koordinasi, perlu diinformasikan juga bahwa ketersediaan beras di Sultra Insya Allah aman sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 H,” tegasnya.

Andap juga mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi (penganekaragaman) pangan dengan

mengonsumsi pangan pengganti beras.

“Di Sultra ini banyak pangan pengganti beras seperti ubi, sorgum, ubi dan sagu. Pada kesempatan ini saya ajak masyarakat mari kita melakukan diversifikasi pangan di tengah kondisi saat ini,” himbunya.

Sementara itu, terlihat antusiasme masyarakat menyambut gelaran GPM di Kota Kendari ini.

“Alhamdulillah, kami senang dengan kegiatan ini, ini sangat meringankan kami di tengah kenaikan harga beras di pasar. Sering-sering ya Pak,” ujar Ningsih (42) salah satu pengunjung GPM. (*)

camatan Kapontori dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Boneatiro pergantian Antar Waktu di Aula Kantor Bupati, Takawa, Kamis sore, 29 Februari 2024.

Dalam kesempatan ini Sekda Buton menyampaikan ucapan selamat kepada yang baru saja dilantik. “Saya berharap bisa amanah dalam menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Buton. Banyak harap masyarakat di pundak

bapak sekalian yang baru saja di lantik,” ungkap Sekda Buton.

Lebih lanjut Sekda juga menekankan tentang tantangan masyarakat di desa karena urusannya sangat kompleks sehingga diharapkan kerjasama stakeholder di desa untuk bekerja dengan lebih baik lagi tentunya.

“Saya minta Pj Kades yang baru saja dilantik untuk terus meningkatkan loyalitasnya dalam melayani masyarakat, perhatikan kesehatan masyarakat, pend-

dikannya dan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang Bapak/ Ibu pimpin serta wajib memberikan pelayanan terbaik,” ungkap Sekda Buton.

Jenderal ASN juga menegaskan atas perintah Pj Bupati Buton untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah abaikan keluhan masyarakat terutama masalah kemiskinan ekstrem, inflasi juga stunting. (*)

Elite Golkar Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional



ini, kata Mekeng, belum membahas wacana itu secara khusus. Dia turut menanggapi sejumlah anggapan miring terhadap Soeharto selama dirinya menjadi presiden.

Mekeng menuturkan bahwa tak ada sosok yang sempurna. Semua orang menurut dia memiliki persepsi dan pandangan masing-masing.

“Memang ya di dunia ini ada yang perfect, semua orang punya pandangan sesuai persepsi masing-masing,” ucap Mekeng.

Setelah diangkat, Soeharto terus menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia lebih dari tiga dekade. Pada masa jabatannya, ia tak lupa memproduksi ragam propa-

ganda anti-PKI, salah satunya dengan membuat film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ yang diragukan rujukan sejarahnya.

Sempat bertahan 32 tahun, kekuasaan Soeharto akhirnya tumbang. Bukan oleh militer atau PKI yang dipropagandakan ke warga, melainkan krisis ekonomi merontokkan kepercayaan masyarakat, perbankan, hingga sesama pejabat Orde Baru.

Hingga pada 21 Mei 1998, ia resmi lengser dengan mewariskan jejak otoritarianisme dan ketakutan pada PKI.

Soeharto yang lahir pada 8 Juni 1921 itu meninggal dunia pada 27 Januari 2008 saat berusia 86 tahun. (*)

5 Amanat MK untuk Perubahan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029



Mahkamah Konstitusi mengamanatkan lima hal yang mesti diperhatikan ketika mengubah aturan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029

Laporan: Hadi

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan lima hal yang mesti diperhatikan pembentuk undang-undang ketika mengubah aturan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membaca pertimbangan hukum dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2).

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," ujar Saldi.

Terdapat lima hal yang dititipkan oleh MK kepada pembentuk undang-undang. Pertama, ambang batas parlemen baru harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang

batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Ketiga, perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyerderhanaan partai politik.

MK juga mewanti-wanti pembentuk undang-undang agar perubahan ambang batas parlemen ini mesti selesai sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

"Keempat, perubahan telah selesai sebelum tahapan Pemilu 2029," kata Saldi.

Selain itu, MK juga meminta pembentuk undang-undang untuk memperhatikan partisipasi publik dalam proses perubahan ambang batas parlemen.

"Kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki per-

wakilan di DPR," kata Saldi.

Sebelumnya, MK memutuskan ambang batas parlemen 4 persen tetap berlaku pada Pemilu Serentak 2024. MK juga memutuskan ambang batas parlemen konstitusional bersyarat di Pemilu 2029.

Perludem Luruskan Kabar Ambang Batas Parlemen Dihapus MK

Agar ambang batas parlemen tetap bisa dipakai di pemilu selanjutnya, maka MK pun memerintahkan perubahan. Hal itu dikarenakan ambang batas parlemen selama ini dibuat tanpa penghitungan yang jelas.

"Menyatakan norma pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ... adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan," jelas Ketua MK Suharto saat membacakan putusan, Kamis (29/2).(*)

antusias oleh warga yang terus meneriakkan nama capres nomor urut 2 itu sejak kedatangannya hingga ia beranjak dari lokasi. Diketahui, pada Pilpres 2024, Dudung berada di barisan pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina kelompok relawan Nderok Guru (Ndaru).

Menhan Prabowo menyapa warga yang menantainya di Cimahi, Jawa Barat. (Arsip Tim Media Prabowo)

Pada beberapa kesempatan, Dudung

tersebut seperti bakso kuah dan bakso goreng ditemani es campur. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat bernyanyi bersama. Ia tampak memegang mic dan menyanyikan beberapa bait lagu 'Tak Ingin Sendiri' yang dipopulerkan Dian Piesesha.

Kedatangan Prabowo dan rombongan itu disambut dengan

Moeldoko Beber soal Komunikasi dan Kabinet Usai AHY Jadi Menteri



Moeldoko beber komunikasi dengan AHY setelah kini sama-sama dalam kabinet. Keduanya sempat berseteru atas kepemimpinan Partai Demokrat.

Laporan: Hasim

MEDAN-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali buka suara mengenai hubungannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah Ketua Umum Partai Demokrat itu menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Keduanya kini sama-sama dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, meski pernah berseteru imbas usaha Moeldoko ambil alih Partai Demokrat yang dipimpin AHY beberapa tahun lalu.

"Ya saya ngobrol biasa (dengan AHY)," kata Moeldoko di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Jumat (1/3/2024).

Moeldoko tak merespons secara gamblang ketika disinggung upaya kudeta, terutama pertemuan mereka ketika sidang kabinet awal pekan ini. Ia hanya menegaskan

politik merupakan hal yang pragmatis.

"Kalau dalam ruang sidang kabinet itu mungkin banyak orang yang bertanya. Gimana ya? Banyak partai politik, kemarin mengatakan ini ada dua hal, satu pilihan politik itu pragmatis kita boleh berbeda tapi sebagai pejabat negara adalah pandangan politiknya musti sama," ujarnya.

Menurut Moeldoko, seluruh pejabat negara di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi harus memiliki pandangan politik yang sama.

"Pandangan politik negara ujungnya adalah apa? Secu-

rity dan prosperous, aman dan sejahtera. Maka seluruh menteri yang diberikan amanat oleh rakyat harus menuju aman dan sejahtera siapa pun tak ada lagi pembedaan dari partai ini dan seterusnya," tegasnya.

Sebelumnya, AHY diangkat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu (21/2/2024). Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menggantikan Mahfud MD.

Moeldoko terpan-tau tak hadir di pelantikan AHY sebagai menteri. Hal itu menjadi sorotan karena histori hubungan Moeldoko dengan AHY.

Keduanya sama-sama menjadi ketua umum Partai Demokrat. AHY terpilih lewat kongres pada 2020. Setahun berikutnya, Moeldoko terpilih lewat kongres luar biasa (KLB).

Dua kubu sempat adu kuat di jalur hukum. Kubu AHY terbukti sah setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepemimpinan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi MA kembali menolak pada 10 Agustus 2023. (*)

Prabowo dan Dudung Makan Siang Bareng di Warung Bakso Cimahi

Laporan: Hadi

JAKARTA-Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mampir makan siang di warung 'Bakso dan Soto Mang Uka' milik eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Cimahi, Jawa Barat pada Kamis (29/2).

Ia duduk semeja dengan Dudung dan Wakil Ketua De-

wan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan alias Iwan Bule. Prabowo mengenakan kemeja berwarna krem, Dudung berkemeja biru muda, sedangkan Iwan Bule mengenakan kemeja putih.

Pada foto yang dibagikan mereka terlihat tertawa lepas sambil menyantap hidangan. Mereka mencicipi sejumlah menu andalan kedai

tersebut seperti bakso kuah dan bakso goreng ditemani es campur.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat bernyanyi bersama. Ia tampak memegang mic dan menyanyikan beberapa bait lagu 'Tak Ingin Sendiri' yang dipopulerkan Dian Piesesha.

Kedatangan Prabowo dan rombongan itu disambut dengan



Prabowo, Iwan Bule, dan Dudung makan siang bareng duduk satu meja di warung bakso dan soto milik eks KSAD itu di Cimahi, Kamis (29/2).

beberapa kali hadir ke acara Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung.

Adapun pada hari ini Prabowo berkegiatan di Bandung,

Jawa Barat. Ia menghadiri acara wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI).

Melalui pidatonya, Prabowo berpesan ke

seluruh wisudawan dan wisudawati agar terus berkontribusi. Terhadap pembangunan bangsa. Ia menyebut Indonesia selalu membutuhkan peran anak muda. (*)

Inflasi Sultra Masih Terkendali Selama Bulan Februari 2024

Pewarta: Mashuri

Kendari,- Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 masih terkendali, hal ini berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Sultra. Jumat (01/03/2024).

Tercatat Inflasi year on year Sultra sebesar 2,90%* setelah sebelumnya pada Januari 2,46%. Sedangkan Inflasi month to month Sultra sebesar 0,19%.

Dengan demikian, Inflasi Sultra berada pada peringkat 20 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia sebelumnya peringkat ke 28 dari 38.

Adapun angka inflasi pada 4 empat Kabupaten/Kota di Sultra yang menjadi penilaian inflasi Sultra yakni, Kabupaten Konawe 4.10%, Baubau 3.58%, Kolaka 2.79% dan kota Kendari 2.27%.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Reviyanto mengatakan inflasi sultra pada bulan Februari 2024 masih relatif stabil.

"Didasari target inflasi yang ditentukan tahun 2024 yakni sebesar 2,5% \pm 1%, maka Inflasi year on year Provinsi Sultra masih dalam rentang terkendali yaitu antara rentang 1,5% hingga 3,5%," katanya. Jumat (01/03/2024).

Sebagai Penyumbang inflasi year on year Provinsi Sultra diantaranya adalah kelompok makanan,



Pj Gubernur Sultra ABR

minuman dan tembakau, kelompok Kesehatan, kelompok Pendidikan, dan kelompok transportasi.

Komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras, dengan inflasi sebesar 21,64% dan andil 1,17%. Meskipun demikian Produksi beras Sultra tahun 2023 sebesar 275,31 ribu ton, naik sebesar 0,09% dibanding tahun 2022 yang sebesar 275,06 ribu ton.

"Sebagai catatan, luas panen turun tapi produksi beras di Sultra naik karena produktifitas tinggi. Ada upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produksi beras seperti bantuan pupuk, perbaikan irigasi dan sebagainya," terang Andap.

Kenaikan harga beras ini terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali 1 Provinsi yaitu Provinsi Jambi. Kenaikan beras seiring dengan naiknya har-

ga gabah di tingkat petani.

Komoditas lain penyumbang inflasi adalah Angkutan Udara, Mobil, Tarif Dokter Umum, Sigaret Kretek Mesin, tomat, sawi hijau, ikan mujair, akademi/perguruan tinggi, emas perhiasan, ikan selar, dan Iya ikan tude.

Tarif dokter umum memberikan andil inflasi Sultra disebabkan ada penyesuaian tarif rumah sakit di Kabupaten Konawe berdasarkan Perda No. 3/2023 ttg pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara Nasional, Inflasi year on year tertinggi di Provinsi Papua Selatan sebesar 4,61% dan yang terendah di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,81%.

Pemprov Sultra di Nahkoda Andap Budhi Reviyanto berkomitmen menekan aju Inflasi di Bumi Anoa. (*)

Pemprov Sultra Respon Cepat Dampak Banjir



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) respon cepat untuk membantu korban terdampak banjir akibat intensitas hujan tinggi di Kota Kendari, Kamis (29/02/24).

Atas nama Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr. (HC) Andap Budhi Reviyanto.,S.I.K.,M.H, Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio mengatakan bahwa Bapak Pj. Gubernur beserta seluruh jajaran Pemprov Sultra turut prihatin atas kejadian banjir ini.

Ia menambahkan, Pj. Gubernur selalu mengingatkan mengenai prediksi curah hujan tinggi yang dikeluarkan BMKG dan potensi banjir serta perlunya langkah-langkah antisipasi.

"Setiap hari saya selalu mengingatkan dan share kembali informasi dari Pak Pj. Gubernur dan BMKG mengenai prediksi cuaca di Whatsapp Group Perangkat Daerah maupun para Bupati/Walikota, hal ini semata-mata untuk menjadi early warning guna melakukan langkah-langkah antisipasi

dan upaya memitigasi resiko bencana," ungkapnya.

Sekda Sultra ini pun berharap dan berpesan agar Perangkat Daerah terkait maupun para Bupati/Walikota memiliki sense of crisis dan kepekaan sosial. Dari info yang ada, agar segera menyiapkan langkah-langkah kontijensi guna mengantisipasi dampak bencana.

Adapun atas instruksi langsung dari Bapak Pj. Gubernur, maka BPBD dan Dinas Sosial langsung turun ke lapangan untuk identifikasi dampak banjir dan menyalurkan bantuan di titik lokasi.

Ses BPBD Pemprov. Sultra Andrian menyampaikan bahwa sementara ini bantuan yang disalurkan di beberapa titik yakni :

1. Kecamatan Mandonga, lorong Merpati : 36 KK terdampak dengan membangun dapur umum, tenda pengungsi, serta

- Paket family kit berupa sabun mandi, sikat dan pasta gigi, shampo, handuk kecil dan dewasa, paket PJK, pembalut wanita, jas hujan, jerigen

lipat, dan container box ;

- Perlengkapan bayi berupa minyak telon, sabun mandi bayi dan shampo, bedak bayi, sikat dan pasta gigi balita, handuk bayi, diapers, botol susu, selimut bayi, gendongan bayi, baju bayi, perlak bayi ;

- Paket alat kebersihan berupa sapu lidi, sepatu boot hitam, kain pel, lap serbaguna, plastik sampah, sarung tangan latex, sikat lantai, ember plastik, sapur air karet, gayung, pengki plastik, sapu nylon, serta tambahan 1.224 sabun mandi ;

2. Kelurahan Benu-Benu berupa terpal, paket family kit, dan paket perlengkapan bayi ;

3. Kelurahan Punggaloba berupa terpal. Tutupnya. (*)

Pemkot Kendari Salurkan Bantuan pada Korban Banjir di Kelurahan Mandonga

Pewarta: Amran

KENDARI, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Sosial Kota Kendari dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Mandonga dan Anggilowu, Jumat (1/3/2024).

Sebanyak 42 paket bantuan diserahkan oleh Dinas Sosial Kota Kendari yang

terdiri dari 32 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Mandonga dan 8 KK di Kelurahan Anggilowu.

Plt. Dinas Sosial Kota Kendari Asman Saaby mengungkapkan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Pemkot Kendari terhadap warga yang terkena musibah.

Kami dari Dinas Sosial dalam hal ini Pemerintah Kota Kendari melakukan intervensi, ini merupakan salah satu ben-

tuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Sekretaris Bapenda ini juga memastikan, semua warga yang terdampak musibah akan diberikan bantuan secepatnya.

"Di daerah lain masih ada warga yang juga terdampak, ini akan kami koordinasikan dengan Baznas agar semua bisa terbantu," tambahnya.

Ditempat yang sama,

Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari Fadlil Suparman mengungkapkan, sebanyak 663 KK yang terdampak banjir, tanah longsor dan pohon tumbang di Kota Kendari.

Dari beberapa kelurahan yang terdampak, yang paling banyak merasakan dampak banjir berada di Kelurahan Kampung Salo dengan 255 KK dan Kelurahan Labibia 165 KK.

"Terhusus di Kelurahan Mandonga warga yang terkena dampak banjir sebanyak 32 KK, selain itu ada juga yang terdampak tanah longsor sebanyak 6 KK," ujarnya.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Komin-



fo Kota Kendari ini juga mengatakan, BPBD Provinsi dan BPBD Kota Kendari juga sudah berkolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Kendari.

"Tadi malam dari BPBD Provinsi me-

nyerahkan 36 paket Family Kit kemudian menyerahkan alat-alat pembersih, kalau kami dari BPBD Kota Kendari juga menyerahkan tikar dan selimut kepada warga yang terdampak di Kelurahan Mandonga

ini," tambahnya.

Untuk diketahui, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyediakan Dapur Umum untuk membantu meredakan warga yang terkena dampak banjir di Kelurahan Mandonga. (*)

TP PKK Kabupaten Buton Kunker di Kecamatan Kapontori



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari, MSi bersama anggota melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Watumotobe, Kecamatan Kapontori, Rabu, 28 Februari 2024.

Kunjungan Kerja TP PKK bersama rombongan untuk menilai TP PKK Kecamatan Kapontori pada Lomba 10 Program Pokok PKK.

TP PKK Kabupaten Buton juga meninjau pemanfaatan pekarangan dan Administrasi PKK.

TP PKK meninjau Toga TP PKK dengan tanaman Holti-

kultura, seperti tanaman cabai, tomat, daun serah, berbagai sayuran seperti bayam, terung kangkung cabut dan masih banyak lagi.

Setelah tim penilai lomba melaksanakan tinjauan di setiap lingkungan per Dasawisma, Tim penilai melanjutkan kegiatan pertemuan di Aula Kantor Camat Kapontori.

Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Andi Asniwati Mustari dalam arahannya menyampaikan agar semua Ibu-ibu penggerak PKK baik di kecamatan maupun kelurahan khususnya di Kecamatan Kapontori untuk selalu bekerja sama

membangun daerahnya, menciptakan suasana lingkungan yg bersih, indah asri dan harmonis (HATINNYA PKK)

“Lomba PKK memiliki maksud yaitu untuk membina kesejahteraan dalam keluarga yang sehat, menciptakan lingkungan yang indah bersih asri dan harmonis, serta pemanfaatan pekarangan yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok sewaktu-waktu dalam keluarga juga pengaturan dalam rumah dengan penataan yg baik terlihat rapi indah dan sehat seluruh anggota keluarga pun sehat. Rakyat sehat negara kuat.”

Tenaga Kerja Sosial di Bimtek



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Sosial Kabupaten Buton melakukan Bimbingan Teknik pada tenaga kesejahteraan social di Anjungan Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Buton, Kamis, 29 Februari 2024.

Sekda Buton, Asnawi Jamaludin, SPd, M.Si dalam sambutannya menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu ditekankan baik OPD terkait maupun tenaga

lapangan baik pendamping PKH, TKSK, pendamping Sosial penyandang disabilitas, maupun TAGANA agar selalu bekerja dengan sebaik baiknya karena tenaga lapangan sebagai pendamping merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah sehingga tetap selalu bekerja, berkolaborasi menjadi mitra yang baik dimana saja.

“Kerja sama yg dimaksud adalah para lurah, kepala desa dan pendamping harus ada komunikasi yg baik se-

hingga data bisa ril. Terkait aata itu sangat penting agar tdk ada masalah di lapangan, karna selalu yang menjadi sasaran masalah itu para lurah dan Kepala Desa dengan penerima kesejahteraan. Itu harus kita hindari jangan terjadi,” katanya.

Sekda juga mengharapkan para pendamping selalu melaporkan data ke Dinas terkait dengan tepat waktu agar data dapat difalidkan dengan cepat pula serta kepada tenaga TKS melayani masyarakat dengan Humanis.”

Pj Bupati Buteng Muh Yusuf Sampaikan Evaluasi Triwulan III di Kemendagri



Laporan: Ardi

BUTENG, BP-Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng), Andi Muhammad Yusuf menyampaikan evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah Triwulan III di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negari di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Dalam menyampaikan laporan capaian kinerja triwulan III, Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf didampingi Kepala Bappeda, Kepala BP-KAD, Kabag Pembangunan dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Laporan kinerja Pj Bupati Buteng

diapresiasi dan dinilai baik oleh Kemendagri karena laporan telah dilakukan sistematis sesuai dengan aspek yang dilaporkan dengan indikatornya, sesuai capaian kinerja yang dilaporkan meliputi aspek pemerintahan, aspek pembangunan, dan aspek kemasyarakatan dan dengan 16 indikator

capaian kinerja.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya sehingga dapat menyampaikan laporan kinerja di triwulan III. (*)

Pemkab Buton Gelar Rakor Pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Bersama Kades dan Camat

Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Kita baru saja melewati pesta demokrasi kesepakatan siap menang siap kalah kadang kita lupa tapi Insya Allah para kepala desa, camat, para kepala OPD yang sudah saya SK kan untuk memantau secara langsung jalannya pesta demokrasi bisa meyakinkan masyarakat bahwa apapun hasil dari pemilu ini kita harus terima dengan baik dan jangan lagi kita termakan isu-isu yang dapat memecah belah kita semua,” demikian dikatakan Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi pada Rakor pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintahan bersama Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Buton, di Aula Kantor Bupati Buton, Rabu, 28 Februari 2024.

Pj. Bupati Buton juga menyampaikan terimakasih kepada kepala desa, Camat, para kepala OPD atas kerjasama dan kekompakan karena sudah ikut memantau secara langsung jalannya pesta demokrasi yang baru saja dilaksanakan serentak pada 14 fe-



bruari lalu

Selain itu Pj. Bupati Buton membahas soal intervensi pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting “Yang kedua saya kira program pemerintah yang menjadi tugas kita adalah soal stunting, kami sudah melakukan pembagian susu gratis yang kemarin kita laksanakan di Desa Kaongke-ongkea dan hari ini di Kecamatan Wolowa,” tambahnya

Dan untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok lanjut orang nomor satu di Kabupaten Buton ini menjelang ramadhan sampai dengan idulfitri pemerintah kabupatrn buton juga turun langsung memantau harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Sabo

“Alhamdulillah Buton masih dalam

kondisi aman sampai dengan pelaksanaan idulfitri utamanya ketersediaan cadangan beras di bulog hari ini dapat terpenuhi dan Kita juga masih bisa mengadakan pasar murah” imbuhnya.

Orang nomor satu di Buton ini mengakhiri sambutannya dengan menghimbau kepada OPD untuk menyikap dan mengindahkan soal penyampaian laporan SPT tahunan. Kantor Pajak Bau-bau membuka mall pelayanan laporan SPT Rabu sampai dengan Kamis, 29 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Bupati Buton.

Pada kesempatan itu, Sekda Buton kembali menegaskan para Kepala OPD untuk melengkapi dan memenuhi permintaan data untuk keperluan laporan penyeleng-

garan pemerintahan daerah.

Jenderal ASN ini juga mengingatkan semua OPD utamanya dinas teknis dalam penanganan stunting tetap melakukan koordinasi dan kalaborasi, bahu membahu dalam penurunan angka stunting.

Pada kesempatan itu juga hadir, Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sultra, La Haruna, SP, MSi yang bakal memberikan bantuan berupa Bibit tanaman bagi petani di Kabupaten Buton.

Rakor juga diisi dengan sosialisasi kemudahan Universitas Terbuka bagi Kepala desa dan perangkat desa, Ketua BPD dan anggotanya serta bagi ASN dan Non ASN untuk melanjutkan Pendidikan di UT. (*)

Layanan Rujukan Humanis Kuatkan Integrasi Layanan Primer



Laporan: Warman

SOLO, BP-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti perlunya perbaikan pada layanan rujukan rumah sakit di Indonesia. Layanan ini tercakup dalam dua pilar transformasi kesehatan, yaitu Pilar 1 Transformasi Layanan Primer dan Pilar 2 Transformasi Layanan Rujukan.

Menteri Budi menegaskan bahwa prinsip rujukan harus bersifat humanis, bukan sekadar administratif. "Pertama, rujukan harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan penyakit," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jawa Tengah pada Kamis (29/2/2024).

Kedua, layanan rujukan rumah sakit perlu disesuaikan dengan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani jenis penyakit tersebut. Ketiga, akses pelayanan harus cepat dan dekat. Artinya, jika puskesmas dapat memberikan layanan yang memadai, pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit.

Menurut Menkes Budi, selama ini sistem rujukan di Indonesia cenderung bersifat administratif. Karena itu, Menkes berkomitmen untuk

melakukan perubahan terhadap layanan rujukan di Indonesia. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, Menkes menyambut baik masukan dari berbagai pihak.

Saat ini, perubahan dalam layanan rujukan sudah mulai diterapkan, khususnya untuk pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Contohnya, pada pasien jantung yang membutuhkan layanan cepat, Menkes Budi akan memastikan puskesmas dilengkapi dengan peralatan seperti elektrokardiogram (EKG), defibrillator, dan obat tenecteplase.

Selain itu, semua dokter umum di puskesmas akan dilatih untuk membaca EKG. Jika diperlukan, hasil EKG dapat dikonfirmasi oleh dokter spesialis jantung. Dokter umum juga akan dilatih untuk memberikan tenecteplase atau enzim yang termasuk dalam golongan obat fibrinolitik.

"Supaya kalau ada serangan jantung, enggak usah nunggu dibawa ke rumah sakit. Prinsipnya gitu kan, biar cepat dan dekat," kata Menkes.

Menkes juga mengajak semua pihak terlibat untuk berkontribusi dalam memperbaiki cara dan budaya kerja yang baik

sehingga Kemenkes dapat meninggalkan perilaku yang merugikan pasien.

Sementara itu, demi mewujudkan transformasi layanan kesehatan primer, Jawa Tengah menerbitkan surat keputusan gubernur sebagai pa yang hukum untuk melakukan uji coba integrasi layanan primer. "Dari 881 puskesmas, kita sudah dapat melakukan uji coba pada bulan ini dan ke depannya. Sebanyak 281 puskesmas, 331 puskesmas pembantu (pustu), dan 2305 posyandu," ungkap Yunita Dyah Suminar, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah.

Ia juga berharap dukungan dari Menteri Kesehatan dengan meluncurkan program Penguatan Integrasi Layanan Primer melalui Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Kegiatan ini, yang mengusung tema "Penguatan Integrasi Layanan Primer dan Rujukan di Jawa Tengah," dihadiri oleh berbagai komponen terkait dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk pemerintah daerah, Pusat, TNI/POLRI, swasta, dan masyarakat. (*)

Uji Formil Ditolak MK, UU Kesehatan No 17/2023 Punya Kekuatan Hukum Mengikat



Laporan: Yeti

JAKARTA, BP-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. MK menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga UU Kesehatan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Supriatno saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis (29/2).

Uji formil merupakan pengujian untuk menilai apakah undang-undang terbentuk dengan cara yang telah diatur perundang-undangan. Dalam permohonan ini, pemohon mengajukan gugatan di antaranya terkait keterlibatan publik dalam penyusunan Undang-Undang Kesehatan.

Dalam putusannya, MK menilai pembentuk undang-undang telah melakukan upaya menjaring keterlibatan masyarakat. Bahkan, pemerintah secara aktif mengundang melalui berbagai forum, termasuk membuat sebuah laman (website) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama para pemangku kepentingan

yang hendak berpartisipasi tidak hanya dari unsur profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan.

"Artinya, pembentukan undang-undang dapat memilah dan memilih/menyaring seluruh saran dan masukan masyarakat untuk dijadikan bahan dalam mengambil keputusan dan perumusan norma dalam setiap pembentukan undang-undang," kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Pertimbangan MK itu berdasarkan empat fakta hukum mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan UU Kesehatan. Fakta pertama, pemohon yang mewakili lima instansi telah diundang untuk konsultasi publik atau public hearing dalam penyusunan Undang-Undang Kesehatan.

Kedua, Kemenkes telah melakukan kegiatan public hearing, focus group

discussion, dan sosialisasi sebagai upaya memenuhi hak masyarakat terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Hak-hak itu, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberi penjelasan,

Ketiga, para saksi yang diajukan ke persidangan mengakui diundang dalam kegiatan konsultasi publik oleh Kementerian Kesehatan. Para saksi juga menyatakan dapat memberikan masukan dan saran terhadap materi muatan rancangan UU Kesehatan.

Keempat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan akses kepada masyarakat terhadap rancangan undang-undang dan naskah akademik. Bahkan, Kementerian Kesehatan memberikan saluran untuk menyampaikan

pendapat masyarakat melalui laman resmi, yaitu <https://partisipasisehat.kemkes.go.id/> dalam bentuk pengisian form pendapat dan masukan secara daring (online).

Pembentukan UU 17/2023 juga dinilai telah mengakomodir sejumlah putusan MK sebagai salah satu alasan perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Kesehatan meski hal itu tidak dicantumkan secara eksplisit dalam landasan yuridis RUU Kesehatan. Sebelumnya, MK memutuskan sejumlah perkara yang memiliki kaitan dengan substansi UU Kesehatan.

MK juga menilai proses penyusunan UU Kesehatan telah sesuai kaidah pembentukan undang-undang yang baik mengikuti metode omnibus. UU Kesehatan juga menerapkan struktur penomoran yang sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, UU Kesehatan tidak cacat formil. (*)

Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma
Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal
Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :
Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :
Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul
Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan
Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :
Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul
Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan
Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Kemenkumham Dukung Usul KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

Laporan: Hamid

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendukung wacana kantor urusan agama (KUA) menjadi tempat menikah semua agama. Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra memandang rencana Kementerian Agama (Kemenag) itu sebagai hal positif.

“Merevitalisasi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan maupun pelaksanaan pernikahan tentu merupakan terobosan yang patut diapresiasi karena selain mempermudah akses juga membuat KUA semakin inklusif dalam memberikan layanan kepada publik,” kata Dhahana dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3).

Meski begitu, Dhahana mengingatkan Kemenag perlu kajian komprehensif pada aspek regulasi, birokrasi, dan sosiologis. Menurutnya, perlu kerja-kerja praktis yang tidak sederhana untuk mewujudkan ide itu.

Dia juga ingin-gatkan Kemenag untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Dhahana tak ingin niat baik itu justru disalahartikan oleh sebagian pihak.

“Yang juga tidak kalah penting, dalam pembahasan revitalisasi KUA itu mungkin juga perlu mendengarkan aspirasi stakeholders terkait khususnya organisasi-organisasi keagamaan,” ujarnya.

Yaqut Buka Peluang Revisi UU Adminder Demi KUA untuk Semua Agama

Dia juga ingin-gatkan persoalan birokrasi. Mengubah KUA menjadi tempat menikah semua agama harus beraturan dengan aturan selama ini soal pencatatan nikah umat agama lain dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Persoalan lainnya adalah perlu perubahan landasan hukum. Kemenag harus bersiap mengubah sejumlah aturan demi menjadikan KUA tempat menikah semua agama.

“Bilamana diperlu-

kan untuk revisi sejumlah regulasi guna merevitalisasi KUA, kami di Direktorat Jenderal HAM siap untuk menjadi partner dialog,” ucap Dhahana.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggagas KUA sebagai tempat menikah semua agama. Jika merujuk aturan yang berlaku, hanya Muslim yang pernikahannya dilayani KUA. Umat agama lain mengurus pencatatan nikah di Dukcapil.

Yaqut beralasan Kemenag adalah kementerian semua agama. Dengan begitu, KUA yang merupakan bawahan Kemenag juga harus melayani semua agama.

“Selama ini kan saudara-saudara kita non-Islam mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Kan gitu. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masak enggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?” kata Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).(*)

IDI Cs Akan Ajukan Uji Materi Usai MK Tolak Uji Formil UU Kesehatan

Laporan: Alwan

JAKARTA-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organisasi profesi (OP) lainnya akan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan uji materi akan diajukan setelah uji formil UU Kesehatan ditolak seluruhnya oleh MK dalam sidang putusan perkara nomor 130/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

“Uji materi nanti masuk pada materi substantif yang kami anggap itu melanggar konstitusi baik itu UU maupun putusan MK,” kata Adib dalam keterangannya, Jumat (1/3).

Adib menyebut kelima OP akan kembali berdiskusi dan mengkaji substansi pasal yang akan digugat. Empat organisasi yang lain adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Ia mengatakan poin penting yang bakal mereka soroti adalah bagaimana UU tersebut wajib menjamin keadilan masyarakat untuk mengakses kesehatan yang sama.

kembali menyerahkan berkas perkara kasus pemerasan Firli ke penyidik Polda Metro Jaya.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan mengatakan pengembalian berkas dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) lantaran masih dinyatakan belum lengkap atau P-19.



IDI dan organisasi profesi akan ajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke MK.

“UU ini bukan hanya kepentingan kami di OP, tapi juga kepentingan rakyat. Di mana rakyat harus mendapat kesehatan yang sama,” kata dia.

Perihal gugatan uji formil yang ditolak MK, Adib mengharagai putusan itu. Ia juga menghormati empat hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion alias pendapat berbeda atas putusan MK tersebut.

Keempat hakim itu adalah Ketua MK sekaligus Hakim Konstitusi Suhartoyo, Wakil Ketua MK sekaligus Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Adib juga mengapresiasi para sejawat yang sudah berjuang bersama dalam memperjuangkan gugatan mereka di MK.

“Yang jelas pada kesempatan kali ini, ini adalah sebagai satu upaya yang sudah kita lakukan, menjamin keadilan masyarakat untuk mengakses kesehatan yang sama.

MK telah meno-

dir memenuhi panggilan pemeriksaan.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur

hidup. Belakangan, polisi menyebut belum menahan Firli karena tengah melakukan pengembangan dari kasus pemerasan tersebut. Polisi akan mendalami sejumlah aset milik Firli Bahuri yang tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).(*)

lak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan oleh sejumlah organisasi profesi dan pihak terkait yang mewakili berbagai organisasi, dalam keterangannya mengakui diundang dalam kegiatan konsultasi publik yang dilakukan oleh pembentuk UU dan dapat memberikan masukan dan saran terhadap materi muatan rancangan UU Kesehatan.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan akses yang terbuka kepada masyarakat terhadap rancangan undang-undang, naskah akademik, serta memberikan saluran untuk menyampaikan pendapat masyarakat secara daring atau online.

Adapun setelah mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon, MK pun berkesimpulan bahwa proses pembentukan UU Kesehatan tidak bertentangan dengan UUD 1945. (*)

Kasus Firli Dinilai Mandek, ICW Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Metro

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam kasus pemerasan Firli Bahuri.

Hal tersebut disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat mengirimkan surat kepada Listyo bersama eks pimpinan KPK Abraham Samad, Saut Situmorang, M. Jasin, serta Ketua PBHI Julius Ibrani.

“Sebagai atasan langsung dari Kapolda Metro Jaya dan penanggung jawab utama proses hukum di kepolisian, Kapolri harus turun tangan mengevaluasi kinerja tim penyidik Polda,” ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (1/3).

Kurnia menilai hal itu penting dilaku-

kan Kapolri lantaran kasus tersebut dinilai ‘jalan di tempat’ pasca penetapan Firli sebagai tersangka pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Menurutnya, Kapolri harus menanyakan secara langsung perkembangan kasus Firli kepada Karyoto. Apalagi berkas perkara Firli telah berulang kali dikembalikan oleh Kejati DKI Jakarta karena dinilai belum lengkap.

“Apalagi di tengah mandeknya penyidikan yang dikerjakan oleh Polda. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, berkas perkara Firli bolak-balik, bahkan hingga tiga kali, dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya,” sambungnya.

Di sisi lain, ICW juga meminta Kapolri untuk memas-

kan penanganan kasus pemerasan itu terbebas dari konflik kepentingan antara Karyoto dengan Firli.

Ia menyebut dugaan konflik kepentingan dalam kasus tersebut sangat berpotensi terjadi lantaran dulunya Karyoto merupakan bawahan Firli saat berada di KPK. Selain itu dari segi jenjang kepangkatan di kepolisian, Karyoto juga masih berada setingkat di bawah Firli.

“Jangan sampai lambatnya penanganan perkara Firli dipengaruhi faktor relasi keduanya. Penanganan dugaan tindak pidana korupsi Firli akan menjadi batu uji atas komitmen antikorupsi Kapolri yang selama ini kerap disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta

Porgram Bangga Kencana Harus Dilakukan Masif dan Terstruktur



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan dan keluarga berencana memerlukan usaha masif dan terstruktur untuk dapat mempromosikan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si mewakili Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat membuka kegiatan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB hari Kamis (29/2/2024).

Peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pencapaian program keluarga berencana dengan mengatur dan mengendalikan jumlah kelahiran. Maka ekonomi dan kesejahteraan keluarga semakin kuat kontribusi ini akan terlihat pada pengu-

rangan kemiskinan dan berdampak positif pada pembangunan masyarakat bisa lebih awal terhadap kesehatan reproduksi dan pentingnya keluarga berencana demi terlahirnya penerus bangsa Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Menurut Saido Bonsai, pada hakekatnya tujuan kegiatan penguatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan program kesertaan ber-KB, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam membina dan menggerakkan kelompok organisasi pada masyarakat dalam pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam mendorong peran serta Ormas dalam pembinaan dan peningkatan kes-

ertaan ber-KB.

Serta meningkatkan keterampilan peserta dalam mengelola kelompok organisasi kemasyarakatan demi peningkatan pemakaian MKJP.

Dikatakan, dalam upaya promotif dan preventif pada kesehatan masyarakat, tidak sepenuhnya yang berperan hanya perempuan saja melainkan butuh peran pria atau suami ikut mengambil andil dalam meningkatkan kesertaan KB di Indonesia khususnya Kota Baubau.

Dijelaskan, kondisi kependudukan saat ini membuka peluang bagi Kota Baubau untuk mendapatkan bonus demografi. Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang efektif, efisien dan tepat sasaran perlu diperhatikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada antara lain seperti angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk yang seimbang. (*)

Resmi Digelar, Kejurda Atletik Terbuka se Sultra

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik terbuka Baubau Se Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2024, Kamis (29/2/2024) resmi digelar dan diharapkan benar-benar meningkatkan prestasi di cabang olahraga Atletik.

Demikian dikatakan Pj Sekda

Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si saat membuka Kejurda Atletik di stadion betoambari Kamis (29/2/2024). Saido Bonsai mengajak dan menghimbau, sekaligus mengingatkan kepada seluruh peserta kejuaraan atletik agar senantiasa menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan, menjunjung

sportifitas, memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Sportivitas dalam artian bisa menghargai dan mengakui keunggulan lawan, juga menyadari dan menerima kekalahan dalam pertandingan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah taati seluruh ketentuan dan peraturan pertandingan yang telah disepak-

Pelaksanaan Pemilu di Baubau Sukses



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Seluruh rangkaian kegiatan pemungutan suara Pemilihan Umum di Kota Baubau pelaksanaannya berlangsung dengan sukses. Meskipun dikauai masih ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran yakni ada pelaksanaan pemungutan suara ulang di 4 TPS.

Demikian dikatakan Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan perolehan suara tingkat kota Baubau dalam pemilihan umum tahun 2024 di villa nirwana Kota Baubau Jumat (1/3/2024).

Menurut Saido Bonsai, beberapa hal yang menjadi pembelajaran agar tidak terulang lagi

terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.

Kemudian ada juga beberapa hal untuk dijadikan bahan renungan karena banyak banyak petugas KPPS yang jatuh sakit sehingga diharapkan Pilkada kedepan tidak terjadi lagi hal seperti ini.

Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonsai menyampaikan terima kasih ke-

pada seluruh penyelenggara yang telah bahu membahu, bersinergi dari penyaluran logistik sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, utamanya Kepada Kapolres Baubau, Dandim Buton, Kejaksaan dan seluruh penyelenggara benar-benar mengawal pelaksanaan ini sampai pada rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Kota Baubau.

“Saya berharap untuk pelaksanaan berikutnya akan lebih tertib lagi dan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di Kota kita ini, karena saya tahu persis di daerah kita ini pelaksanaan Pilkada itu sangat rawan. Apalagi, mengingat 5 tahun yang lalu Sultra dianggap zona hitam terkait dengan Pemilu-kada. Dan semoga pelaksanaan rapat pleno hari ini sampai 3 hari kedepan tidak terjadi apa-apa, dan tetap sukses apa yang kita lakukan,“ ujarnya optimis. (*)



ati bersama sebelumnya.

Saido Bonsai mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Baubau serta Pengcab PASI Kota

Baubau yang telah menyelenggarakan Kejurda Atletik tahun 2024 dan sehingga atas segala bantuan, dukungan serta kerjasamanya sehingga Kejurda Atletik tahun 2024 dapat terselenggara dengan baik.

Kejurda Atletik ini diikuti antara lain utusan dari Kabupaten Wakatobi, Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Baubau sebagai penyelenggara.

Sedangkan jenis lomba yang diikuti adalah Lomba lari 500 meter putra-putri, lari 800 meter putra-putri, lari 100 meter putra-putri, lempar turbo putra-putri, dan lompat jauh putra-putri. (*)